BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Realitas sosial menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk oleh warga gereja. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin Indonesia berada pada angka 8,25 persen.[1] Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Toraja Utara pada 2025 tercatat 10,05 persen, yang mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan.[2] Kondisi ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menjadi tantangan bagi gereja dalam menjalankan panggilannya, terutama dalam pelayanan diakonia sebagai wujud kasih kepada sesama. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar tetap relevan sebagai persoalan sosial dan gerejawi.

Sebagai respon terhadap persoalan tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program bantuan sosial. Salah satu program tersebut adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui mekanisme *non-tunai.*[3] Program ini

[1] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen," *Berita Resmi Statistik,* 5 Februari 2026; Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, "Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, 2025."

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Toraja Utara 2025*. Rantepao: BPS Kabupaten Toraja Utara, 2025."

[3] Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai,* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019), 12.

dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran serta efektivitas penyaluran bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga BPNT, menjadi salah satu bentuk konkret kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan kemiskinan.

Di sisi lain, di lingkungan gereja bantuan sosial pemerintah berjumpa dengan bantuan pelayanan diakonia sebagai bagian dari tanggung jawab iman dalam menolong sesama. Pelayanan diakonia tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga merupakan wujud nyata kehadiran kasih Allah dalam kehidupan jemaat.[4] Dalam praktiknya, warga jemaat sering kali menerima bantuan dari dua sumber sekaligus, yaitu dari gereja dan dari pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup jemaat berlangsung juga melalui berbagai sarana dalam kehidupan sosial.

Meskipun Pengakuan Gereja Toraja (PGT) BAB VII Butir 6 mengatakan bahwa, pemerintah dan lembaga-lembaga sosial merupakan alat di tangan Tuhan untuk menyelenggarakan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran, serta untuk memerangi kejahatan dalam tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada rakyat[5]. Namun demikian, dalam kenyataan kehidupan jemaat masih ditemukan adanya kecenderungan pemahaman yang memisahkan kedua bentuk bantuan tersebut sebagai bagian dari karya pemeliharaan Alla. Pemisahan ini menunjukkan adanya persoalan teologis dalam pemahaman jemaat, yaitu ketidakmampuan melihat karya Allah dalam realitas sosial yang lebih luas. Padahal, Gereja Toraja

[4] Natalia, "Pelayanan Diakonia" (Skripsi, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2020), 12.

[5] BPS GEREJA TORAJA, Pengakuan Gereja Toraja, (PT. Sulo: Gereja Toraja, 2023), "Bab VII Butir 6".

sebenarnya telah memberikan penegasan teologis yang jelas mengenai peran pemerintah dalam kehidupan iman jemaat.

Persoalan teologis muncul ketika bantuan pemerintah langsung disebut sebagai pemeliharaan Allah tanpa penilaian kritis, atau sebaliknya ketika karya pemeliharaan Allah dibatasi hanya pada bantuan gereja. Kesimpulan pertama berisiko menyakralkan program dan pejabat, sehingga korupsi, manipulasi, salah sasaran, atau politisasi tidak lagi dipersoalkan. Kesimpulan kedua berisiko mempersempit karya Allah hanya pada lembaga gereja. Sehingga, kedua posisi tersebut perlu diuji dari pengalaman jemaat dan konsep *Providentia Dei*.

Menurut John Calvin, Allah tidak meninggalkan dunia setelah penciptaan, melainkan terus memelihara serta memerintah ciptaan. Allah dapat bekerja melalui sarana atau sebab sekunder, termasuk keluarga, pekerjaan, lembaga sosial, gereja, dan pemerintahan. Namun, penggunaan sarana sekunder tidak meniadakan tanggung jawab moral manusia. Karena itu, tindakan yang adil dapat diakui sebagai sarana pemeliharaan, sedangkan manipulasi dan ketidakadilan tetap harus dinilai sebagai penyimpangan manusia.[6]

Berdasarkan ketegangan tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan sejak awal bahwa BPNT pasti merupakan *Providentia Dei*. Penelitian memusatkan perhatian pada pemahaman warga Jemaat Ledo tentang BPNT dan diakonia, pengalaman konkret penerimaan bantuan, penilaian kritis terhadap pemerintah sipil, serta implikasinya bagi spiritualitas dan pelayanan gereja.

[6] John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles, 2 jilid (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1960), I.xvi.4 dan I.xvii.3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka untuk menjawab masalah tersebut, dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana warga Jemaat Ledo memahami BPNT, diakonia, dan hubungan keduanya dengan pemeliharaan Allah?
2. Bagaimana pengalaman penerimaan dan praktik BPNT di Jemaat Ledo dinilai secara kritis berdasarkan konsep *Providentia Dei* dan pemerintahan sipil menurut John Calvin?
3. Apa implikasi teologis dari penilaian tersebut bagi spiritualitas, sikap kritis, dan tanggung jawab sosial Jemaat Ledo?

1.3 Batasan Masalah

Objek penelitian ialah pengalaman, pemahaman, dan penilaian warga Jemaat Ledo yang menerima atau pernah menerima BPNT, disertai keterangan dari majelis gereja jemaat Ledo serta pihak pemerintahan. Penelitian ditinjau dari konsep *Providentia Dei* menurut John Calvin.

Penelitian tidak melakukan evaluasi nasional, atau pengukuran efektivitas BPNT. Akan tetapi, aspek pelaksanaan BPNT dibahas sejauh diperlukan untuk melakukan penilaian teologis mengenai manfaat, akses, ketepatan sasaran, data, tekanan sosial, dan politisasi.

Penelitian juga tidak menyimpulkan bahwa semua tindakan pemerintah merupakan karya moral Allah. BPNT dinilai sebagai kemungkinan sarana sekunder pemeliharaan Allah berdasarkan fungsi konkretnya dalam menopang

kehidupan dan mewujudkan keadilan. Penyimpangan tetap ditempatkan sebagai tanggung jawab manusia.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemahaman warga Jemaat Ledo mengenai BPNT, diakonia, dan hubungan keduanya dengan pemeliharaan Allah.
2. Mengetahui pengalaman penerimaan serta praktik BPNT di Jemaat Ledo berdasarkan konsep *Providentia Dei* dan pemerintahan sipil menurut John Calvin.
3. Merumuskan implikasi teologis-pastoral bagi spiritualitas, sikap kritis, dan tanggung jawab sosial Jemaat Ledo.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan di Gereja Toraja Jemaat Ledo, Klasis Buntao'. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap penerima BPNT, majelis gereja jemaat Ledo, serta pihak pemerintah. Data sekunder diperoleh dari literature-literatur teologis.

1.5.1 Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi bersifat non-partisipatif dan diarahkan pada konteks penerimaan bantuan, interaksi penerima dengan pelaksana, praktik pelayanan diakonia, serta situasi sosial yang relevan.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan pedoman terbuka agar informan dapat menjelaskan pengalaman dengan bahasanya sendiri. Pokok pertanyaan bagi penerima meliputi manfaat BPNT, pengalaman penyaluran, ketepatan sasaran, perlakuan pelaksana, kemungkinan tekanan politik, pemahaman tentang diakonia, dan cara memaknai pemeliharaan Allah. Wawancara dengan majelis menelusuri pengajaran gereja, praktik diakonia, dan bentuk pendampingan. Wawancara dengan pihak pemerintah atau pendamping menelusuri tujuan, prosedur lokal, pembaruan data, pengaduan, dan masalah implementasi.

Dengan persetujuan informan, wawancara direkam dan ditranskripsikan. Apabila perekaman ditolak, peneliti membuat catatan rinci dan mengonfirmasikan kembali pokok penting kepada informan.

1.5.2 Teknik Analisis Data

Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data dimulai.

a. Reduksi Data

Tahap pertama adalah reduksi data yaitu proses menata data, melalui transkripsi hasil wawancara, kemudian memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang dianggap penting dari hasil wawancara dengan jemaat, majelis gereja, dan pihak pemerintah. Data yang tidak

relevan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data yang penting akan dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Pada tahap ini peneliti juga melakukan pemberian kode (coding) untuk menandai jawaban informan berdasarkan topik yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi yang sistematis, kemudian dikelompokkan kedalam tema-tema sehingga memudahkan peneliti melihat hubungan antar data serta memahami keseluruhan fenomena masalah yang diteliti. Proses ini dilakukan melalui analisis tematik, yaitu mengelompokkan kode-kode menjadi tema tertentu.[7]

c. Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti membedah dan menafsirkan dan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang digunakan, khususnya tentang konsep *Providentia Dei* menurut John Calvin serta fokus penelitian yang dikaji. Analisis dilakukan dengan membandingkan perspektif jemaat penerima BPNT, majelis, dan pihak pemerintah. Selanjutnya, peneliti melakukan refleksi teologis dengan menggunakan konsep *Providentia Dei*, sebab-sebab sekunder, tanggung jawab manusia, pemerintahan sipil, dan diakonia. Melalui proses ini peneliti berupaya memperoleh pemahaman mengenai bagaimana BPNT

[7] Virginia Braun dan Victoria Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide* (London: SAGE, 2022).

ditinjau dari konsep *Providentia Dei* serta mengidentifikasi implikasinya bagi Jemaat Ledo.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi secara terus-menerus untuk memastikan keabsahan data dan kesimpulan akhir yang diperoleh konsisten, dapat dipercaya, dan sesuai dengan fakta di lapangan.

1.6 Signifikansi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Providentia Dei dengan menunjukkan pentingnya membedakan antara providentia Allah, sarana sekunder, tanggung jawab manusia, dan penilaian moral terhadap kebijakan publik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu Jemaat Ledo membangun spiritualitas yang bersyukur tanpa kehilangan daya kritis. Jemaat dapat mengakui kemungkinan karya Allah melalui struktur sosial, sekaligus menolak penggunaan bahasa teologis untuk membenarkan ketidakadilan.

Penelitian ini juga diharapkan mendorong gereja untuk tidak hanya melakukan diakonia karitatif, tetapi juga mendampingi jemaat dalam memahami hak sosial, menyampaikan pengaduan, mengawasi ketepatan sasaran, dan memperjuangkan tata kelola bantuan yang adil.

1.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa warga Jemaat Ledo dapat menerima pertolongan melalui pelayanan diakonia gereja dan program sosial pemerintah, termasuk BPNT. Kedua bentuk pertolongan tersebut tidak selalu dimaknai dengan cara yang sama. Diakonia lebih mudah dipahami sebagai bagian dari pelayanan iman, sedangkan BPNT cenderung dipahami sebagai kebijakan administratif negara. Perbedaan pemaknaan tersebut menimbulkan pertanyaan teologis mengenai cara jemaat memahami karya pemeliharaan Allah di dalam kehidupan sosial.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian terlebih dahulu menggali pemahaman dan pengalaman warga jemaat mengenai BPNT dan diakonia. Data lapangan mencakup manfaat bantuan, proses penerimaan, ketepatan sasaran, akses, transparansi, perlakuan terhadap penerima, serta kemungkinan penyalahgunaan atau politisasi. Data itu kemudian dibaca dengan konsep *Providentia Dei* menurut John Calvin, terutama mengenai pemeliharaan dan pemerintahan Allah, penggunaan sarana-sarana sekunder, tanggung jawab moral manusia, pemerintahan sipil, serta hubungan gereja dan negara.

Melalui alur tersebut, penelitian tidak memulai analisis dengan kesimpulan bahwa BPNT pasti merupakan bentuk pemeliharaan Allah. Penelitian menilai secara kritis sejauh mana program itu sungguh menopang kehidupan, melayani keadilan, dan menghormati martabat manusia. Hasil penilaian teologis selanjutnya digunakan untuk merumuskan implikasi bagi spiritualitas, sikap kritis, tanggung jawab sosial, dan pelayanan pastoral Jemaat Ledo.